

## PEMILIHAN UMUM

2017

UU NO.7, LN.2017/NO.182

### UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien, bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</li> <li>- Dasar hukum dari Undang-Undang ini : UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 Ayat (3), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C Ayat (1), dan Pasal 22E.</li> <li>- Dalam Undang-Undang diatur tentang Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Pemilu, Asas, Prinsip dan Tujuan, Struktur, Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan KPU, Tugas wewenang dan Kewajiban KPU, Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian menjadi Anggota KPU, Mekanisme Pengambilan Keputusan KPU, Pertanggungjawaban dan Pelaporan KPU, Panitia Pemilihan PPK, Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS, Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS, Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPLN, Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPSLN, Peraturan dan Keputusan KPU, Susunan, Tugas dan Wewenang Sekeretariat KPU, Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan Pengawas Pemilu, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu, Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Bawaslu, Mekanisme Pengambilan Keputusan, Pertanggungjawaban dan pelaporan Bawaslu, Peraturan dan keputusan Pengawas Pemilu, Pembentukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban DKPP, Tatacara, Peserta dan Persyaratan mengikuti Pemilu, Hak Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye Pemilu, Pemungutan Suara, Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang, Penghitungan Suara, Penetapan Hasil Pemilu, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan penetapan Pasangan Calon Terpilih, Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pemantauan Pemilu, Pendanaan, pelanggaran, Sengketa Proses Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu, Tindak Pidana dan Ketentuan Pidana Pemilu.</li></ul>
---------	--

CATATAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.</li><li>2. Undang-Undang ini mencabut UU No. 42 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011 dan UUNo. 8 Tahun 2012.</li></ol>
---------	---